



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 336 /IV.15/HK/2026

TENTANG

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN MELALUI OPEN DATA LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pemenuhan data statistik guna penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan kebijakan Satu Data Indonesia, telah dilakukan tahap perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan Data Statistik Sektorial Kabupaten Lampung Selatan melalui E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI);
- b. bahwa untuk mendukung ketersediaan data, tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral yang baik, serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, data yang telah memiliki nilai guna dan telah melalui proses validasi perlu disebarluaskan kepada publik melalui Open Data Lampung Selatan (gotrack.lampungselatankab.go.id/opendata);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektorial Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui Open Data Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 hal Implementasi SIPD;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 hal Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI);

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 600.5.4/4924/Bangda tanggal 10 Juli 2024 hal Progres Pengisian Modul E-Walidata dan RPJPD 2025-2045 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MELALUI OPEN DATA LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Menyebarluaskan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang telah memiliki nilai guna, telah melalui proses validasi, dan dikumpulkan oleh Produsen Data, untuk kemudian disebarluaskan melalui Open Data Lampung Selatan (gotrack.lampungselatankab.go.id) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Menyebarluaskan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang telah memiliki nilai guna, telah melalui proses validasi, dan dikumpulkan oleh Produsen Data, untuk kemudian disebarluaskan melalui Open Data Lampung Selatan (gotrack.lampungselatankab.go.id) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 Agustus 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 336 /IV.15/HK/2026
TANGGAL : 29 Agustus 2026

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025
1.01.000001	Asrama sekolah	Unit	jumlah asrama sekolah yang tersedia	0
1.01.000002	Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	jumlah asrama sekolah yang perlu direhabilitasi	0
1.01.000003	Asrama sekolah yang layak	Unit	jumlah asrama sekolah yang dinilai layak	0
1.01.000004	Asrama sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah keseluruhan asrama sekolah yang rusak sedang/berat	0
1.01.000005	Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	Jumlah Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	1
1.01.000007	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi	Bahasa	jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi	0
1.01.000008	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi	Bahasa	jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi	0

			coverage), dan rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth)	
2.16.000133	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui shared media - Shared media adalah media tidak berbayar , termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dll	215
2.16.000134	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah - Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah	6
2.16.000135	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal	Orang	& - Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal - Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang	5000000

2.18.000001	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.	208
2.18.000002	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang	208

			Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.	
2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	1
2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.	Dokumen	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	1
2.18.000006	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	1
2.18.000007	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	5

8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda)	2
-------------	---	---------	---	---

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA